



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BATUSANGKAR

Jalan Hamka No 24 Batusangkar Telp (0752) 71032 Fax. (0752) 71027
e-mail : batusangkarrutan@yahoo.co.id

Nomor : W.3.PAS.PAS.22.PR.04.01-607
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Rutan Kelas II B Batusangkar Semester I
Tahun 2023

Batusangkar, 18 Juli 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Barat
di -
Padang

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023 dari Rutan Kelas II B Batusangkar, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Plt. KEPALA,

MUHAMAD KAMEILY
NIP. 19740504 199902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
3. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BATUSANGKAR SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BATUSANGKAR
Jalan Hamka No 24 Jorong Parak Jua, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat 27211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun Anggaran 2023 dapat disusun sebagaimana mestinya. LKJIP Semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan evaluasi kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dan penetapan kinerja ini merupakan suatu tekad / janji yang akan di wujudkan oleh seorang penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memberikan amanah. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua dokumen ini juga disusun untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmen Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LKJIP ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam ikut serta melakukan pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen dalam bidang pemenuhan, pembinaan dan pelayanan hukum serta pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar.

Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Semester I Tahun Anggaran 2023 akan menjadi tolak ukur untuk pencapaian pada semester dan tahun berikutnya. Namun pada umumnya seluruh kegiatan telah diupayakan untuk dikerjakan dan pada semester I tahun anggaran 2023 kekurangan dan kendala yang ada akan dijadikan masukan untuk membuat kebijakan agar seluruh anggaran bisa diserap dengan tetap pada prinsip efektif dan efisien.

Selanjutnya LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar Semester I Tahun

Anggaran 2023 ini dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar dimasa yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi timbal balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengejawantahan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar, sekaligus sebagai bentuk upaya menjaga tranparansi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam melaksanakan pelayanan, pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Batusangkar, 30 Juni 2023



Plt. K E P A L A

MUHAMAD KAMEILY
NIP.19740504 199902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar semester I tahun 2023 ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar. LKJIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pemenuhan dan pelayanan yang optimal di bidang hukum untuk masyarakat.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah terjadi efisiensi. Sedangkan pada input Sumber Daya Manusia (SDM) telah digunakan SDM yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dilihat dari capaian indikator output, terdapat kecenderungan yang berkesesuaian dengan rencana, bahkan dalam beberapa kegiatan telah dapat mencapai sasaran kegiatan dengan baik.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan para pimpinan, Pembina, instansi terkait dan stakeholders dalam setiap program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar, sangat penting dan berpengaruh pada hasil capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar.

Terkait dengan perbaikan ke depan terdapat beberapa catatan, khususnya menyangkut inovasi program, pengelolaan program, peningkatan kinerja dan pengawasan. Dalam hal ini perlu peningkatan alokasi anggaran tahun 2023, mengingat bertambahnya jumlah program dan kegiatan serta jangkauan sasaran dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar.

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Bab I. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Aspek Strategis	9
1.5 Isu Strategis	10
1.6 Dasar Hukum	10
1.7 Sistematika Laporan	11
BAB II. Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	29
3.3 Capaian Kinerja Anggaran	29
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	31
BAB IV. Penutup	34
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35
Lampiran	
Dokumen Perjanjian Kinerja	



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar merupakan unit pelaksana teknis masyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang masyarakatan. Berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Masyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Secara geografis bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar terletak di Kabupaten Tanah Datar yang beribu kota Batusangkar dengan luas tanah $\pm 2300 \text{ m}^2$ dan luas bangunan kantor $\pm 1900 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Hamka No.24 Parak Juar Batusangkar. Luas bangunan Blok $\pm 203 \text{ m}^2$. Rutan Batusangkar merupakan bangunan cagar budaya dan aset bagi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar karena berdiri pada tahun 1865 pada Jaman Penjajahan Hindia Belanda dan telah direnovasi pada tahun 1992 dan 1996 yaitu penambahan ruang kantor pada sayap kiri dan kanan serta pembangunan ruangan bimbingan kerja, rumah dinas permanen dan kamar mandi umum 2 (dua) pintu khusus pegawai dan keluarganya yang tinggal di rumah dinas.

Direktorat Jenderal Masyarakatan telah menetapkan program strategis sebagai parameter/indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Reorientasi tugas dan fungsi masyarakatan yang pernah dikemukakan pada suatu kesempatan oleh Direktur Jenderal Masyarakatan mengandung maksud agar prosedur-prosedur dan prinsip lainnya yang cenderung ditinggalkan oleh petugas perlu dilaksanakan dan ditaati kembali oleh jajaran masyarakatan di Pusat dan Daerah. Instrumen pengukuran kinerja yang tertuang dalam bentuk metrik tolak ukur Kinerja Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan telah disosialisasikan oleh Tim dari Ditjen Masyarakatan kini saatnya dimanfaatkan dalam rangka memacu pada tahun berikutnya. Sementara saat ini, perkembangan masyarakat yang semakin kritis terutama dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat orang banyak diantaranya; isu-isu HAM, good governance, penegakan hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah sewajarnya dapat mewujudkan visi agar masyarakat memperoleh

kapastian hukum. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dituntut menyesuaikan arah dan gerak reformasi serta transformasi global. Selain itu, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar juga berkewajiban melakukan respon positif dan mampu memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/ terdakwa ;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;

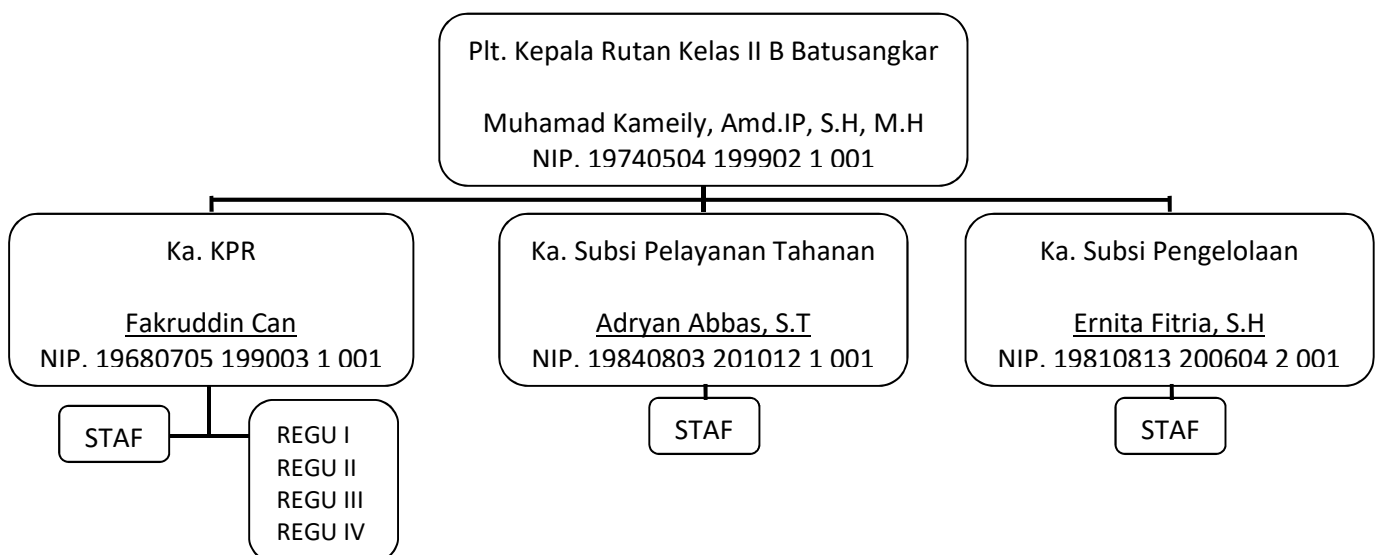
Mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dijelaskan dengan luas sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Memberikan pelayanan terhadap hak-hak tahanan/ Narapidana seperti Layanan Penyuluhan Hukum, Fasilitasi Bantuan Hukum, dll.
	Memberikan layanan perawatan yang meliputi perawatan kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan Tahanan/ Narapidana serta perawatan kesehatan
	Melakukan penyelenggaraan pengawasan Dan penegakan disiplin
	Melakukan kegiatan pelayanan teknis (administrasi dan ketatausahaan)

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Seksi Pengelolaan Rutan	- Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan
Kesatuan Pengamanan Rutan	- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan - Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan - Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban
Sub Seksi Pelayanan Tahanan	- Melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana (warga binaan masyarakat) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana. - Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan - Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

Fungsi dan Wewenang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar

Adapun Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tanggal 1 Maret 2005 dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Batusangkar

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem pengendalian gambaran kinerja instansi untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam pencapaian target kinerja semester I tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam mewujudkan visi dan misi sebagai good governance;
2. LKjIP sebagai perwujudan akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar kepada pihak yang memberi mandat/amanah serta LKjIP sebagai sarana dalam penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
3. Untuk mengukur, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar semester I tahun 2023;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan yang diperlukan di periode yang akan datang.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Adapun Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar adalah sebagai berikut :

1. Sub Seksi Pengelolaan Rutan
 - a. Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan
2. Kesatuan Pengamanan Rutan
 - a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan
 - b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
 - c. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban
3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 - a. Melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana (warga binaan pemasyarakatan) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana.

- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

1.5 ISU STRATEGIS

Pencapaian Kinerja merupakan keberhasilan atau kegagalan dari suatu Institusi. Akan tetapi dalam pencapaiannya ada hal-hal yang dapat menghambat dan menjadi isu strategis. Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian kinerja. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar selalu memperhatikan isu-isu strategis pada masing-masing sub seksi yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Setiap awal tahun masing-masing sub seksi memetakan faktor-faktor yang kemungkinan menjadi hambatan di semester I tahun 2023.

Pada tahun 2023 perkembangan teknologi informasi semakin berkembang sehingga banyak aplikasi-aplikasi baru yang ada pada tahun masing-masing. Seiring dengan perkembangan Aplikasi-aplikasi tersebut Pegawai dituntut untuk bisa menggunakan dan mengelolanya sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kinerja masing-masing tahun tersebut. Namun masih ada pegawai yang belum mampu dan memahami teknologi informasi sehingga belum semua Aplikasi bisa digunakan oleh pegawai. Selain itu, pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar masih banyak pegawai yang merangkap melaksanakan tugas dan mengelola aplikasi-aplikasi tersebut sendiri. Untuk itu penambahan pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai perlu dikembangkan lagi dan hal ini masih menjadi Isu strategis dalam pencapaian kinerja.

Untuk mengoptimalkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian antara lain perlunya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan diadakannya diklat/pelatihan/e-learning secara berkala, dan perlunya penambahan prasarana terutama pemenuhan peralatan IT seperti Body Scanner Metal Detector, x ray security scanner, komputer, printer, scanner dan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

1.6 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar semester I tahun 2023, disusun berdasarkan beberapa landasan hukum di antaranya :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar selama periode Januari-Juni (Semester I) Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, sistematika penyajian LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Maksud dan Tujuan

D. Aspek Strategis

E. Isu Strategis

F. Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Kinerja

C. Capaian Kinerja Anggaran

D. Capaian Kinerja lainnya

Bab IV: Penutup



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut :

VISI dan MISI

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatanyaitu :

Visi : *Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.*

Misi :

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan.
- b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

TATA NILAI KEMENKUMHAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

"**BerAKHLAK**" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tanpa henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat seriat disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas .
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasarakatan.
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan.
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Anak Binaan secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Binaan.
6. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan.
8. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.

9. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

- Meningkatnya kesadaran hukum Anak Binaan dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
- Meningkatnya produktifitas Anak Binaan menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

- Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

d. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas

2.2 PERJANJIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BATUSANGKAR

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		4. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2023



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%	100	125%
	2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100	106%
	3. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	117%
	4. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	117%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	-	-
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100	111%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100	111%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak adanya Pengaduan	-
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Tidak ada gangguan kamtib Rutan Batusangkar	-
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Tidak ada WBP Rutan Batusangkar yang melakukan gangguan kamtib	-
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Tidak ada terjadi gangguan kamtib di Rutan Batusangkar	-
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan	-	-
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	-	-
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	-	-
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan	-	-
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023

Dapat dijelaskan dari Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indikator 1

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar adalah Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana.

2. Indikator 2

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas bidang pelayanan tahanan adalah Menurunnya tahanan yang overstaying, dan terlaksananya layanan penyuluhan hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar serta terfasilitasinya layanan bantuan hukum pada Rutan Kelas II B Batusangkar.

3. Indikator 3

Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan keamanan dan ketertiban adalah sejauh mana antisipasi keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar yang terakait dengan unit layanan pengaduan bagi Tahanan/ Narapidana, pengawalan tahanan, operasional was internal dan penegakan kamtib terkait kegiatan razia, penggeledahan Tahanan/ Narapidana dan antisipasi gangguan kamtib lainnya. Serta adanya pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.

4. Indikator 4

Hal penting yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar adalah meningkatnya dukungan layanan manajemen satker. Keberhasilan indikator ini dapat dinilai dari penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan, penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan, peningkatan kompetensi pegawai dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel.

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021, Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		2021	2022	SEMESTER I TH 2023
1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	100%	100%	100%
	2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%	100%

	Narkotika di wilayah				
		3. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
		4. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying	100%	100%	-
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	-
		2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dicegah	100%	100%	-
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtibmas	100%	100%	-
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	100%	100%	-
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	-

		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	-
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	-
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	-
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	-

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Renstra :

Indikator kinerja	Target Jangka Menengah				Realisasi Kinerja		
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	71%	71%	80%	85%	100%	100%	100%
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%	100%	100%	100%
Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%	100%	100%	100%
Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%	100%	100%	100%
Persentase menurunnya	70%	70%	75%	80%	100%	100%	-

Tahanan yang Overstaying							
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	75%	80%	100%	100%	100%
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	75%	80%	100%	100%	100%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	80%	85%	100%	100%	-
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	75%	80%	100%	100%	-
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	80%	85%	100%	100%	-
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguankamtib secara tuntas	60%	60%	75%	80%	100%	100%	-
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

Tabel Perbandingan dengan tahun Renstra

Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif

Solusi yang telah dilakukan :

Faktor Keberhasilan :

1. Dukungan dari Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-

program dan kegiatan;

2. Semangat dan Kerjasama seluruh petugas dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Kerjasama dan koordinasi dengan dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Peningkatan jumlah petugas dan pelatihan yang diberikan kepada petugas dalam peningkatan kinerja;

Faktor Penghambat :

1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI, Dinas Terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
3. Belum terpenuhinya jumlah SDM secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni;

Solusi yang dilakukan :

1. Membangun koordinasi secara maksimal dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan rolling petugas;
3. Melaksanakan pelatihan kepada petugas secara langsung maupun secara virtual;
4. Melakukan MoU dengan Dinas terkait.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Terkait dengan perbaikan ke depan terdapat beberapa catatan, khususnya menyangkut inovasi program, pengelolaan program, peningkatan kinerja dan pengawasan. Dalam hal ini perlu peningkatan alokasi anggaran tahun 2023, mengingat bertambahnya jumlah program dan kegiatan serta jangkauan sasaran dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Batusangkar.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.188.065.000,- dengan realisasi anggaran semester I tahun 2023 sebesar Rp. 1.719.591.475,- atau sebesar 53,94%.

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	1.762.970.000,-	941.807.165,-	53,42%
2	Belanja Barang	1.425.095.000,-	777.784.310,-	54,58%
3	Belanja Modal	-	-	-
TOTAL		3.188.065.000,-	1.719.591.475,-	53,94%

Tabel Realisasi dan Capaian Anggaran Semester I Tahun 2023

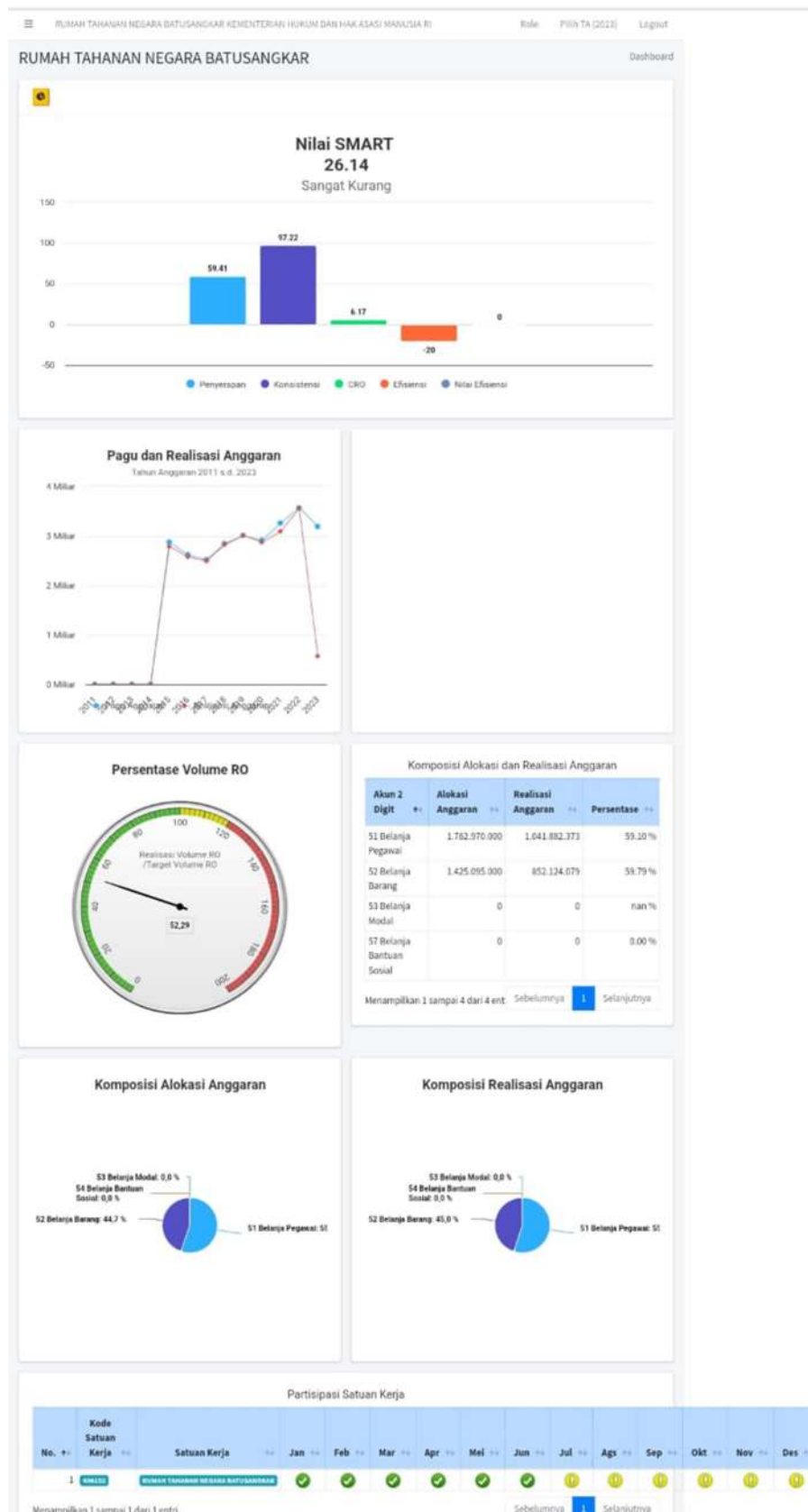
3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.188.065.000,- dengan realisasi anggaran semester I tahun 2023 sebesar Rp. 1.719.591.475,- atau sebesar 53,94%.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021, Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023

NO	KINERJA KEUANGAN SATKER	TAHUN 2021	TAHUN 2022	SEMESTER I TAHUN 2023
1	PAGU	3.233.587.000,-	3.574.880.000,-	3.188.065.000,-
2	REALISASI	3.091.686.223,-	3.560.549.428,-	1.719.591.475,-
3	CAPAIAN	95,61%	99,60%	53,94%

Nilai SMART Semester I Tahun 2023 :



Gambar Nilai Aplikasi SMART

Nilai IKPA Semester I Tahun 2023 :

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	
RUMAH TAHANAN NEGARA BATUSANGKAR	Nilai	100.00	80.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.08
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
	Nilai Akhir	10.00	8.08	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	
	Nilai Aspek	90.41		100.00				100.00		

Gambar Nilai IKPA

3.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. E-Performance

Hasil Laporan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Rutan Kelas IIB Batusangkar berdasarkan Aplikasi E-Performance sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	
			KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)		
1.	Meningkatnya Pelayanan Rawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Penanganan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narokosta di wilayah	1.1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar 1.1.1.1. Sasaran Kinerja Pegawai			30 Persen Triwulan IV	TNI	300	Persen	300	100	Januari: Tertib sampai tanggal 31 Januari 2023 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar, terdapat 106 orang WBP yang terdiri dari 65 orang Narapidana dan 41 orang Tahanan. Mereka memperoleh pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Februari: Tertib sampai tanggal 24 Februari 2023 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar, terdapat 100 orang WBP yang terdiri dari 66 orang Narapidana dan 31 orang Tahanan. Mereka memperoleh pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Maret: Tertib sampai

Gambar Aplikasi E Performance

Detail dari Tabel Perjanjian Kinerja di E Performance :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%	100	125%
		b. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100	106%
		c. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	117%
		d. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	117%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	4. Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying	90%	-	-
		5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100	111%
		6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100	111%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak adanya Pengaduan	-
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Tidak ada gangguan kamtib Rutan Batusangkar	-
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Tidak ada WBP Rutan Batusangkar yang melakukan gangguan kamtib	-
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Tidak ada terjadi gangguan kamtib di Rutan Batusangkar	-

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	-	-
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	-	-
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	-	-
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	-	-
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023

b. E-Monev Bappenas



Gambar Aplikasi E Monev Bappenas



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semester I tahun 2023. LKjIP semester I tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar selama semester I tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi di bidang Hukum dan HAM. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar sebagai penyanggautama penyelenggaraan dan penegakan hukum telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud sistem hukum yang baik, perkembangan hukum, pembangunan hukum dan pelayanan hukum yang efektif dan efisien serta berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai Program dan Kegiatan yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam perkembangan, pembangunan serta pelayanan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

pemasyarakatan.

2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan kinerja dari para staf dan pengelola agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelayanan di bidang pemasyarakatan, hukum dan HAM.
4. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
6. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB BATUSANGKAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Kameily
Jabatan : Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukamto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Batusangkar


Muhamad Kameily
NIP. 19740504 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATUSANGKAR DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 881.364.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 881.364.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.306.701.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.306.701.000,-

Padang, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat



Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Batusangkar



Muhamad Kameily
NIP. 19740504 199901 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATUSANGKAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Kameily

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 04 Januari 2023

Pt. Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Batusangkar

Muhamad Kameily
NIP. 19740504 199901 1 001